BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, urusan penanaman modal daerah ditetapkan menjadi urusan yang ditangani oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, maka berdasarkan amanat pasal 19 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009, Rincian Tugas Pokok, Fungsi Satuan, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung perlu diatur lebih lanjut oleh Walikota Bandung. (Peraturan Walikota Bandung Nomor 410 Tahun 2010 tentang TUPOKSI BAPPEDA Kota Bandung)

Salah satu pembangunan Kota Bandung yaitu dengan adanya Pengembangan Ekonomi di Kota Bandung dengan menitikberatkan Investasi pada sektor–sektor penting dan menjanjikan yang ada di Kota Bandung. Merupakan tugas pokok pada Penanaman Modal yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung, dengan menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang koordinasi promosi dan penanaman modal daerah. Menyelenggarakan pengkajian kebijakan teknis dan fasilitasi

pengendalian penanaman modal, menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan penyelenggaraan fasilitasi promosi dan peluang investasi serta infrastruktur pendukung investasi. Kegiatan promosi yang sudah terjadwal setiap periodenya, dimana sudah menjadi kagiatan rutin dalam satu periode kerja menjadwalkan kegiatan promosi dalam usaha menarik investor pada bidang penanaman modal. (TUPOKSI Bidang Penanaman Modal BAPPEDA Kota Bandung)

Kegiatan promosi adalah salah satu dari kegiatan pemasaran perusahaan, yang kegiatannya memberikan informasi kepada masyarakat atau konsumen seputar jasa atau produk yang akan ditawarkan kepada konsumen. Kegiatan promosi juga merupakan kegiatan komunikasi antara perusahaan dengan konsumen. (Ateng Rudi Rachmansyah, 2015)

Kegiatan promosi diperlukan untuk menarik Investor guna mengembangkan dan meningkatkan perekonomian daerah, baik investor dalam negeri maupun investor asing. Namun, pengajuan kegiatan promosi tidak semudah yang dibayangkan. Banyak hal–hal yang dipertimbangkan dalam pelaksanaan kegiatan promosi. Dituntutnya Transparansi mengenai kegiatan promosi, dimana dalam satu kegiatan promosi harus transparan dalam setiap kegiatan, baik dalam hal pengeluaran, pemasukan dan output apa yang akan dicapai. (Deden Rusyana, 2015)

Dalam kegiatan ini juga harus ada kejelasan mengenai kegiatan yang dilakukan, baik apa pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi atau ada atau

tidaknya pengaruh yang didapat yang berhubungan dengan investasi atau untuk menarik para investor, jika sekiranya tidak ada output yang dirasa penting atau tidak didapatkan, tentu saja kegiatan ini tidak akan berjalan. (Deden Rusyana, 2015)

Dalam proses pencairan anggaran promosi menggunakan beberapa metode yang salah satunya adalah metode Langsung (LS), metode LS sendiri merupakan metode pencairan guna pembayaran kegiatan yang telah dilaksanakan, dimana pihak ketiga sebagai penerima hak atas penyedia barang atau jasa. (Deden Rusyana, 2015)

Pada bidang penanaman modal di Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Bandung, hambatan yang terjadi pada saat proses pencairan anggaran langsung yaitu Kurangnya SDM dalam proses penyusunan yang mengakibatkan lamanya proses penyusunan laporan pertanggungjawaban sehingga keterlambatan pemberian laporan pertanggungjawaban kepada bendahara pengeluaran, kesalahan input informasi yang mengakibatkan harus dilakukannya pengecekan ulang terhadap pihak ketiga selaku pemberi kwitansi, dan juga kesalahan proses pengklasifikasian data setelah SPP sudah berjalan, sehingga harus dilakukan perbaikan dari awal dan pengecekan kembali. (Dede Sopyan, 2015)

Oleh karena itu beberapa hal tersebut menjadi penghambat dalam kegiatan di bidang penanaman modal. Bidang penanaman modal harus menyusun kembali rencana kegiatan promosi dan mengganggarkan kembali kegiatan tersebut sesuai

kebutuhan dan sesuai anggaran yang dikeluarkan jika anggaran yang diterima tidak sesuai dengan yang dianggarkan. (Deden Rusyana, 2015)

Berdasarkan uraian diatas, uraian diatas penulis mengambil judul laporan kerja praktek pada instansi pemerintah dengan Judul Laporan Kerja Praktek : **“ IMPLEMENTASI PENCAIRAN ANGGARAN KEGIATAN PROMOSI BIDANG PENANAMAN MODAL PADA BAPPEDA KOTA BANDUNG “**

1.2 Tujuan Kerja Praktek

Adapun tujuan dari Laporan Kerja Praktek ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses Pencairan Anggaran Kegiatan Promosi Bidang Penanaman Modal Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam proses pencairan anggaran kegiatan promosi Bidang Penanaman Modal Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung.
3. Upaya apa saja yang dilakukan Bidang Penanaman Modal mengatasi hambatan dalam Proses Pencairan Anggaran Kegiatan Promosi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Dengan adanya Kerja Praktek ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1.3.1 Kegunaan Praktis

Dengan adanya Kerja Praktek ini penulis mendapatkan banyak informasi dan ilmu yang didapatkan dan berharap dapat memberikan manfaat bagi penulis, instansi juga peneliti lainnya.

1. Bagi Instansi

   Hasil dari laporan ini diharapkan bisa menjadi masukan pemikiran terhadap Bidang Penanaman Modal dalam Proses Pencairan Anggaran Kegiatan Promosi di Badan Perencanaan Pembanguna (BAPPEDA) Kota Bandung. Memperoleh tenaga kerja yang bermanfaat dalam membantu menyelesaikan tugas perusahaan

2. Bagi Penulis

   Bagi penulis dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang proses pencairan anggaran kegiatan promosi dengan menggunakan metode langsung, mengetahui proses penyusunan berkas-berkas yang diperlukan sebagai syarat pendukung, seperti penyusunan dokumen bukti-bukti pengeluaran guna menyusun laporan pertanggungjawaban, serta mengetahui dokumen pendukung apa saja yang diperlukan dalam proses pencairan anggaran.

1.3.2 Kegunaan Akademis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang diperlukan mengenai Proses Pencairan Anggaran Kegiatan Promosi bagi peneliti lainnya atau bagi pengguna data yang memerlukan. Selain memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca mengenai proses pencairan anggaran di instansi pemerintahan, serta terjalinnya hubungan kerja sama antar isntansi pemerintah dan instansi pendidikan khususnya mahasiswa, yang juga memberikan manfaat berupa pengetahuan dan pengalaman yang tidak didapat saat proses belajar di tempat kuliah.

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan kerja Praktek

1.4.1 Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

Tempat kerja praktek ini dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung yang berlokasi di Jalan. Tamansari no. 76 Bandung.

1.4.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Adapun waktu pelaksanaan kerja praktek ini mulai tanggal 27 Juli sampai dengan tanggal 7 September 2015 yang dilaksanakan di Bidang Penanaman Modal Pada Kantor Bandan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Kota Bandung. Adapun waktu aktivitas dan pelaksanaan kerja praktek ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1

Waktu Kerja Praktek

NO	AKTIVITAS	HARI	WAKTU	PENEMPATAN
1	Kerja Praktek	Senin s/d Jum'at	08.00 WIB - 16.00 WIB	Penanaman Modal
2	Istirahat	Senin s/d Jum'at	12.00 WIB – 13.00 WIB	Penanaman Modal
		Jum'at	11.30 WIB – 13.00 WIB	Penanaman Modal
3	Libur	Sabtu s/d Minggu	-	

Tabel 1.2

Pelaksanaan Kerja Praktek

Tahap	Prosedur	Bulan						
		Juni 2015	Juli 2015	Agst 2015	Sept 2015	Okt 2015	Nov 2015	Des 2015
I	Tahap Persiapan							
	1. Mengambil Surat Ijin Kerja Praktek							
	2. Mencari Tempat Kerja Praktek							
	3. Menentukan Tempat Kerja Praktek							
II	**Tahap pelaksanaan**							
	1. Mengajukan Surat Permohonan Kerja Praktek							
	2. Meminta Surat Pengantar ke Perusahaan							
	3. Kerja Praktek di Perusahaan							
	4. Penyusunan Laporan Kerja Praktek							
III	**Tahapan Pelaporan**							
	1. Menyiapkan Lapran Kerja Praktek							
	2. Bimbingan Kerja Praktek							
	3. Penyempurnaan Laporan Kerja Praktek							